



PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN

Kabupaten Luwu Timur

2017



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUWU TIMUR



PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN

Kabupaten Luwu Timur

2017



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUWU TIMUR**



KATA PENGANTAR

Publikasi “Perkembangan Perekonomian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017” ini disusun dalam upaya memberikan gambaran perekonomian Kabupaten Luwu Timur secara makro, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha.

Sejak tahun 2014, penghitungan PDRB telah menggunakan tahun dasar 2010 dan berbasis Sistem Neraca Nasional Tahun 2008 sebagaimana direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Angka yang disajikan dalam publikasi ini telah melalui proses rekonsiliasi di tingkat provinsi beserta kabupaten lainnya dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian keseimbangan serta kelayakan data baik antar daerah dengan data di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan maupun antar daerah itu sendiri makin konsisten.

Kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan pada masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang membantu sehingga publikasi ini diterbitkan, kami ucapkan banyak terima kasih.

Semoga publikasi ini membawa manfaat bagi kita semua.

Malili, November 2018
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUWU TIMUR
K e p a l a,

ANDHY MURPHY, S.Sos., MH
NIP. 19590114 198605 1 014

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
PENJELASAN TEKNIS	vi
BAB I. PENJELASAN UMUM	1
BAB II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN	8
2.1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8
2.2. Pertambangan dan Penggalian	14
2.3. Industri Pengolahan	16
2.4. Pengadaan Listrik dan Gas	23
2.5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	26
2.6. Konstruksi	26
2.7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28
2.8. Transportasi dan Pergudangan	30
2.9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34
2.10. Informasi dan Komunikasi	36
2.11. Jasa Keuangan dan Asuransi	38
2.12. Real Estat	46
2.13. Jasa Perusahaan	47
2.14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	49
2.15. Jasa Pendidikan	50

	Halaman
2.16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50
2.17. Jasa Lainnya	51
BAB III. TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN LUWU TIMUR	55
3.1. Produk Domestik Regional Bruto	55
3.2. Pertumbuhan Ekonomi	58
3.3. Struktur Perekonomian	61
3.4. PDRB Perkapita	63
3.5. PDRB Kabupaten Luwu Timur Tanpa NTB Subkategori Pertambangan Biji Logam	65
BAB IV. PERBANDINGAN PDRB KABUPATEN LUWU TIMUR DENGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	66
4.1. Produk Domestik Regional Bruto	66
4.2. PDRB Menurut Kategori/Lapangan Usaha	67
4.3. Pertumbuhan Ekonomi	68
4.4. PDRB Perkapita	70
4.5. Posisi Kabupaten Luwu Timur	71
Lampiran	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 PDRB Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2013-2017**) (trilyun rupiah)	57
Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur, 2013-2017**) (persen)	60
Gambar 3.3 Struktur Perekonomian Kabupaten Luwu Timur, 2017**) (persen)	64
Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan, 2013-2017**) (persen)	71
Gambar 4.2 PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2017**) (juta rupiah)	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB	5
Tabel 1.2 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010	6
Tabel 1.3 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	7
Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013-2017**)	56
Tabel 3.2 PDRB Menurut Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017**)	58
Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013-2017**)	61
Tabel 3.4. Struktur Perekonomian Menurut Kategori Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013–2017**)	63
Tabel 3.5 PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013–2017**)	65
Tabel 3.6 PDRB Kabupaten Luwu Timur 2013–2017**)	66
Tabel 3.6 PDRB Kabupaten Luwu Timur 2013–2017**)	66
Tabel 3.6 PDRB Kabupaten Luwu Timur 2013–2017**)	66
Tabel 3.6 PDRB Kabupaten Luwu Timur 2013–2017**)	66
Tabel 3.6 PDRB Kabupaten Luwu Timur 2013–2017**)	66
Tabel 3.6 PDRB Kabupaten Luwu Timur 2013–2017**)	66
Tabel 4.1 Perbandingan PDRB Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017**)	68
Tabel 4.2 Perbandingan PDRB Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2017**)	69
Tabel 4.3 Perbandingan PDRB Menurut Kategori/Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017**)	70
Tabel 4.4. Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan, 2013-2017**)	72
Tabel 4.5 PDRB Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan Tahun 2017**)	73

PENJELASAN TEKNIS

1. Penghitungan statistik neraca nasional yang digunakan di sini mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang dikenal sebagai “Sistem Neraca Nasional”. Namun penerapan statistik neraca nasional tersebut telah disesuaikan dengan kondisi social ekonomi Indonesia.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
3. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.
4. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan

harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu.

5. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke- n terhadap nilai pada tahun ke $n-1$ (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke $n-1$, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian
6. **Output** adalah nilai dari seluruh produk yang dihasilkan oleh lapangan usaha dengan memanfaatkan faktor produksi yang tersedia di suatu wilayah (negara, provinsi, kabupaten, dan sebagainya) dalam suatu periode waktu tertentu (umumnya satu tahun), tanpa memperhatikan asal-usul pelaku produksinya.
7. **Upah/gaji** adalah nilai tambah yang dibayarkan sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi tenaga kerja (termasuk di dalamnya imputasi upah dan gaji).



BAB I

PENJELASAN UMUM

PERKEMBANGAN
PEREKONOMIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2017

BAB I

PENJELASAN UMUM

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Dalam perencanaan pembangunan ekonomi diperlukan berbagai macam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Data mengenai tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat perlu disajikan melalui statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Pengertian PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara, yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Dasar Perubahan Tahun Dasar PDRB

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan system pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *System of National Accounts 2008* (SNA2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi dan kabupaten untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

Manfaat Perubahan Tahun Dasar

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Implikasi Perubahan Tahun Dasar

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar ?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000.

Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;

- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun¹;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index /PPI*);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya :

- **Konsep dan Cakupan : Perlakuan *Work-in Progress (WIP)* pada *Cultivated Biological Resources (CBR)* :**
Merupakan penyertaan pertumbuhan asset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti nilai tegakan padi yang belum di panen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.
- **Metodologi : Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge (IBSC)* menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM)***

¹ SNA1993, para 16.76: “constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing”

- **Valuasi : Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (*Basic Price*).**
Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.
- **Klasifikasi :**
Klasifikasi yang digunakan berdasarkan Internasional Standard Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI 2010).

Perbandingan perubahan konsep dan metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

Variabel (1)	Konsep Lama (2)	Konsep Baru (3)
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial.	Menggunakan metode <i>Imputed Bank Services Charge (IBSC)</i> .	Menggunakan metode <i>Financial Intermediary Services Indirectly Measured (FISIM)</i>
3. Valuasi	Harga Produsen:	Harga Dasar:
4. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.2 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000 (1)		PDRB Tahun Dasar 2010 (2)	
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	●	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	●
2. Pertambangan dan Penggalian	●	B. Pertambangan dan Penggalian	●
3. Industri Pengolahan	●	C. Industri Pengolahan	●
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	●	D. Pengadaan Listrik dan Gas	●
5. Konstruksi	●	E. Pengadaan Air	●
		F. Konstruksi	●
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	●	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	●
7. Pengangkutan dan Komunikasi	●	H. Transportasi dan Pergudangan	●
		I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	●
		J. Informasi dan Komunikasi	●
8. Keuangan, Real estat, dan jasa perusahaan	●	K. Jasa Keuangan	●
		L. Real Estat	●
		M,N. Jasa Perusahaan	●
9. Jasa-jasa	●	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	●
		P. Jasa Pendidikan	●
		Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	●
		R,S,T,U. Jasa Lainnya	●

Sementara klasifikasi PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan seperti table berikut :

Tabel 1.3 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000 (1)	PDRB Tahun Dasar 2010 (2)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPR
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor



BAB II

RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN

PERKEMBANGAN
PEREKONOMIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2017

BAB II

RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN

Ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha diuraikan dalam bab ini, serta cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 dan sumber datanya.

2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala pengusaha yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

2.1.1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

2.1.1.1 Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Data produksi dan harga padi dan palawija diperoleh dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS.

2.1.1.2 Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Data produksi dan harga komoditas hortikultura diperoleh dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman hortikultura dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

2.1.1.3 Tanaman Perkebunan

Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman

perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Data produksi dan harga komoditas perkebunan diperoleh dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

2.1.1.4 Peternakan

Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Golongan ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

Data produksi dan harga komoditas peternakan diperoleh dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Peternakan (Ternak Besar dan Kecil, Ternak Unggas, dan Sapi Perah) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Peternakan BPS.

2.1.1.5 Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu. Output kegiatan pertanian diperoleh dari Subdit Neraca Barang BPS. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan oleh BPS. Sedangkan untuk kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar diestimasi menggunakan pendapatan devisa dari penjualan satwa liar yang datanya diperoleh

dari Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.1.2 Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Data produksi kayu bulat dan hasil hutan lainnya berasal dari Dinas Kehutanan, dan Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan kehutanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Kehutanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Kehutanan BPS.

2.1.3 Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Data produksi dan harga komoditas perikanan diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi

kelompok perikanan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan BPS.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources (CBR)*. Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work-in-Progress (WIP)*. Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP ditambah dengan nilai pelengkapnya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara. Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

2.2 Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

2.2.1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Subkategori Pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Subkategori ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan penghitungan yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode penghitungan. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi.

Data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Data Harga/Indikator Harga juga diperoleh dari Ditjen Migas, ESDM, Statistik PLN, dan Indeks Harga Produsen (IHP) Gas dan Panas Bumi sebagai penggerak harga gas alam dan panas bumi setiap triwulan; Data Struktur Biaya diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Statistik Pertambangan Migas BPS. Data harga minyak mentah menggunakan *Indonesia Crude Price (ICP)*, harga gas bumi pada tahun 2010 yang digerakkan berdasarkan IHP Gas dan Panas bumi. Harga uap panas bumi menggunakan harga panas bumi yang terdapat pada publikasi tahunan Statistik PLN dan digerakkan dengan IHP gas dan panas bumi untuk mendapatkan harga triwulanan.

2.2.2 Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan Batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan. Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan Lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

Untuk memperoleh output batubara dan lignit digunakan metode pendekatan produksi. Untuk memperoleh NTB atas dasar harga berlaku dan konstan 2010 digunakan dengan cara yang sama seperti pada subkategori pertambangan migas yaitu revaluasi. Data produksi batubara dan lignit serta Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh dari Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM; Statistik Pertambangan Non Migas BPS serta beberapa data dari BPS provinsi /kabupaten/kotamadya; Dinas Pendapatan Daerah.

2.2.3 Pertambangan Bijih Logam

Sub kategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainnya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya, antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium (bauxit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain-lain;

serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya.

Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan deflator Indeks Harga Produsen (IHP) tembaga dan emas.

2.2.4 Pertambangan danPenggalian Lainnya

Subkategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subkategori ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Output dan produksi barang-barang galian terdapat pada publikasi Statistik penggalian tahunan.

2.3 Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

2.3.1 Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi

Subkategori ini mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti: pengilangan minyak dan gas bumi, di mana meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk disini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas. KBLI 2009: kode 19

2.3.2 Industri Makanan dan Minuman

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori, yaitu Industri Makanan dan Industri Minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri minuman mencakup pembuatan minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi dan produk the dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009: kode 10 dan 11.

2.3.3 Industri Pengolahan Tembakau

Subkategori ini meliputi pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (snuff), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain. KBLI 2009: kode 12

2.3.4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti: sprei, taplak meja, gordain, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Subkategori ini juga mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi, pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 13 dan 14.

2.3.5 Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Subkategori ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Subkategori ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 15

2.3.6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman

Subkategori ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, Subkategori ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Subkategori ini tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya: pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang

bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan dan bambu. KBLI 2009: kode 16

2.3.7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Kertas dan Barang dari Kertas, dan Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Industri Kertas dan Barang dari Kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan utama. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai tehnik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan industri pencetakan; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. KBLI 2009: kode 17 dan 18.

2.3.8 Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

Subkategori ini terdiri dari dua industri yaitu Industri Kimia dan Industri Farmasi dan Obat Tradisional. Industri Kimia mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri Farmasi dan Obat Tradisional mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Golongan ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat

tradisional atau jamu dan produk botanikal untuk keperluan farmasi. KBLI 2009: kode 20 dan 21.

2.3.9 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Subkategori ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya; pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, pengolahan dasar plastik atau daur ulang. Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di golongan ini, misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009: kode 22.

2.3.10 Industri Barang Galian Bukan Logam

Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk disini. KBLI 2009: kode 23.

2.3.11 Industri Logam Dasar

Subkategori ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Contoh produk: industri besi dan baja dasar, penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 24

2.3.12 Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik

Subkategori ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, container/wadah dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak

bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009: kode 25, 26 dan 27.

2.3.13 Industri Mesin dan Perlengkapan

Kegiatan yang tercakup dalam Subkategori Industri Mesin dan Perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus. Subkategori ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian dan rumah tangga. KBLI 2009: kode 28

2.3.14 Industri Alat Angkutan

Subkategori ini mencakup Industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta Industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer. KBLI 2009: kode 29 dan 30.

2.3.15 Industri Furnitur

Industri Furnitur mencakup pembuatan mebeller dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan pembuatan mebeller adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk

estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebeller cenderung menjadi kegiatan yang khusus. KBLI 2009: kode 31

2.3.16 Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Subkategori ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Subkategori ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Subkategori ini bersifat residual, proses produksi, bahan input dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum. Subkategori ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya. KBLI 2009: kode 32 dan 33.

Sumber data Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi terdiri dari: Data produksi Pengilangan Migas diperoleh dari, Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Data produksi/indikator produksi Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Industri BPS. Data harga produk pengilangan minyak bumi diperoleh dari Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga LNG diperoleh dari harga ekspor LNG dari Direktorat Statistik Distribusi BPS, kurs ekspor dari Direktorat Neraca Pengeluaran BPS, sedangkan indikator harga untuk Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Harga BPS. Data struktur biaya diperoleh dari Publikasi Statistik Pertambangan Migas-BPS.

Sumber data Industri Makanan dan Minuman sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan terdiri dari: Produksi/Indikator Produksi yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu indeks produksi Industri Besar Sedang (IBS) dan indeks produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) diperoleh dari Direktorat Statistik Industri - BPS. Data Harga/Indikator Harga diperoleh

dari Direktorat Statistik Harga - BPS. Data Struktur Biaya diperkirakan dari Hasil Survei Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK - BPS ditambah dengan berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP.

Pendekatan penghitungan untuk kegiatan Industri Pengolahan Migas menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan digunakan cararevaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih output atas dasar harga konstan dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Pendekatan estimasi untuk Industri Batubara sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga konstan menggunakan pendekatan ekstrapolasi yaitu perkalian antara output tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga berlaku dihitung dari output atas dasar harga konstan dikalikan indeks harga pada masing-masing tahun. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikurangi dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan

Dalam penghitungan NTB Industri pengolahan subkategori ini, tabel SUT 2010 menjadi acuan sebagai tahun dasar 2010.

2.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air

panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

2.4.1 Ketenagalistrikan

Subkategori ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun oleh perusahaan swasta (Non-PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Data yang diperlukan data produksi dan harga. Data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun non-PLN. Sama seperti data produksi, harga juga mencakup harga penjualan dan harga pembangkitan, Baik data produksi maupun data harga, diambil dari PT. PLN setiap triwulan dan juga statistik PLN yang terbit setiap tahun. Selain itu juga diperlukan data subsidi listrik dari Kementerian Keuangan.

2.4.2 Pengadaan Gas dan Produksi Es

Subkategori ini menghasilkan Gas Alam, Gas Buatan, Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es. Subkategori ini mencakup pembuatan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Subkategori ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian perubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Kegiatan Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Metode penghitungan seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi dan harga gas kota diperoleh dari PT PGN(Persero). Data produksi dilaporkan langsung oleh PT. PGN setiap tiga bulan. Sementara data harga dikutip dari laporan keuangan PT. PGN yang terbit setiap tiga bulanan. Untuk data harga, terdapat jeda satu triwulan sehingga harus diestimasi untuk triwulan terakhir.

2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan Nilai Tambah Bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Dan untuk data harga yang tidak tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan dan air bersih. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Penghitungan pengelolaan Sampah/Limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan dan pembersihan sampah dilakukan oleh Pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD.

Sumber Data Produksi adalah BPS - Subdit.Statistik Pertambangan dan Energi,APBD (Kemenkeu); dataOutput Sampah diperoleh dari Subdit. Statistik IBS BPS; Data Harga diperoleh dariSubdit Statistik Harga Produsen BPS; Data Struktur Biyadiperoleh dariHasil Survei Tahunan Air Bersih BPS.

2.6 Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat

tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; Instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium, pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung, pengecatan, pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir, pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya, penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan untuk memperkirakan Output harga berlaku adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan Output harga konstan, Output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan IHPB konstruksi sebagai deflator. Sementara konsumsi antara didapat dengan menggunakan metode *commodity flow* beberapa komoditas utama dari konsumsi antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari

nilai output berlaku dikurangi dengan biaya antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data indikator produksi kayu log, bambu dan produk industri bukan migas dari Subdirektorat Neraca Barang-BPS; produksi aspal dari Statistik Perminyakan Indonesia (SPI) Ditjen Migas-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); ekspor semen dari Subdirektorat Statistik Ekspor BPS dan Asosiasi Semen Indonesia (ASI); impor semen dan bahan bangunan SITC 3 digit dari Subdirektorat Statistik Impor BPS. Indikator harga berupa IHPB bahan bangunan dari Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar BPS. Indeks konstruksi dari publikasi Statistik Konstruksi, Subdirektorat Statistik Konstruksi BPS.

2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau

penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

2.7.1 Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

2.7.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam subkategori ini.

Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang "*commodity flow approach*". Margin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri. Kemudian output atau margin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan

pendekatan produksi, dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstannya nilai tambah berlaku yang diperoleh di-deflate menggunakan IHK umum (BPS).

Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah data output barang dari industri domestik (dari Subdit Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi BPS.

2.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang terjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

2.8.1 Angkutan Rel

Angkutan Rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI).

Metode estimasi yang digunakan yaitu pendekatan produksi. Indikator produksi adalah jumlah penumpang dan barang yang diangkut atau jumlah km-penumpang dan km-ton barang. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diolah dari laporan keuangan PT. KAI. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan rel dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh

dengan metode ekstrapolasi yaitu dengan menggunakan jumlah penumpang dan barang sebagai ekstrapolatornya. NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh berdasarkan perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun 2010.

2.8.2 Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan *charter*/sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta *jasa angkutan dengan saluran pipa* untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaraan wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkutan). Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/ armada wajib uji (taksi, angkot, bis, dan truk) diperoleh dari Subdirektorat Info Lantas POLRI. Data untuk penghitungan struktur output dan rasio NTB diperoleh dari laporan keuangan PT Perusahaan Pengangkutan Djakarta (Perum PPD), PT Djawatan Angkoetan Motor RI (Perum DAMRI) dan beberapa perusahaan angkutan darat *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.8.3 Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode ekstrapolasi, yaitu indeks produksi jumlah penumpang dan indeks muat barang sebagai ekstrapolatornya. Sedangkan NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dan PT Djakarta Lloyd, serta IHK jasa angkutan laut dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public* angkutan laut dari Bursa Efek Indonesia.

2.8.4 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Selanjutnya, NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-

rata output per barang dan rata-rata output per kendaraan diperoleh dari PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, serta IHK jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT. ASDP Indonesia.

2.8.5 Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Sedangkan NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya untuk masing-masing harga tersebut.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh dari PT Angkasa Pura I (Kawasan Tengah dan Timur Indonesia) dan PT Angkasa Pura II (Kawasan Barat Indonesia). Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang/km-penumpang dan rata-rata output per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia Airlines dan PT Merpati Nusantara Air-lines; serta IHK jasa angkutan udara dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.8.6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal & parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa

ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public*. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode deflasi, yaitu dengan membagi nilai output atas dasar berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti : PT Angkasa Pura I & II, PT Pelabuhan Indonesia I-IV, PT Jasa Marga, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Bhandha Ghara Reksa, PT PBM Adhiguna Putera, PT KBN, dan beberapa perusahaan *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan indikator harga berupa IHK sarana penunjang transpor dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

2.9.1 Penyediaan Akomodasi

Subkategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi.

Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB subkategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi.

Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Subdit Statistik Pariwisata, BPS. Indikator harga menggunakan data tarif dari Survei Hotel Tahunan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Pariwisata, BPS.

2.9.2 Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan subkategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Dan indikator harganya berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan, output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok

sebagai deflator. Dan NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB.

Data indikator produksi sub kategori penyediaan makan dan minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010 - BPS. Sedangkan data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman dan rokok dari publikasi Indikator Ekonomi BPS.

2.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori ini terdiri dari beberapa industri yaitu penerbitan, produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik, penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi), telekomunikasi, pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti cd rom buku referensi dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan Survei Industri Besar dan Sedang, serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan *go public* bergerak di industri informasi dan telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari Subdit Statistik Industri Besar dan Sedang dan Subdit Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi BPS, perusahaan *go public* dibidang televisi dan teknologi informasi, Direktorat Pembinaan

Kesenian dan perfilman, Dirjen Ekraf Seni dan Budaya Kemenparekraf, sedangkan kegiatan telekomunikasi diperoleh dari perusahaan telekomunikasi *go public* seperti: PT Telkom dan anak perusahaannya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel); PT Indosat dan anak perusahaannya, Excel Axiata; PT. Bakrie Telecom; dan PT. Smartfren Telecom, Sedangkan indikator harga berupa indeks harga seperti: IHP percetakan dan penerbitan dari Subdit Statistik Harga ProdusenBPS; IHK umum dan IHK jasa komunikasi dari Subdit Statistik Harga Konsumen BPS.

2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

2.11.1 Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan ini mencakup kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Jasa Perantara Keuangan sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank

Indonesia). Output atas dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, dan imputasi jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga. Output bank sentral (Bank Indonesia) dihitung adalah jumlah atas biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk konsumsi antara, pengeluaran untuk upah/gaji pegawai, pajak, dan penyusutan. Sedangkan output KSP, BMT dan Jasa Moneter lainnya diperoleh dengan mengalikan rata-rata pendapatan usaha dengan masing-masing jumlah usahanya. Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK Umum dan Indeks Implisit PDB tanpa Jasa Perantara Keuangan. Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia.

2.11.2 Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

Asuransi dan Reasuransi

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak tertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak tertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil *underwriting*, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan

metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen, BPS.

Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pensiun. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan dana pensiun diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.11.3 Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya meliputi mencakup kegiatan *leasing*, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan

sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

Pegadaian

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Pegadaian, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan leasing lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk *finance lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Pembiayaan kartu kredit mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Pembiayaan anjak piutang

mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga pembiayaan diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Modal Ventura

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan modal ventura diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.11.4 Jasa Penunjang Keuangan

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Keegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari pendapatan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) diperoleh dari PT BEI, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Manager Investasi

Manager investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Metode estimasi untuk output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan

perusahaan manager investasi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan manager investasi diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga kliring dan penjaminan diperoleh dari PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode

deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Wali Amanat

Wali amanat (*trustee*) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan wali amanat. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan wali amanat diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Jasa Penukaran Mata Uang

Jasa penukaran mata uang (*money changer*) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan jasa penukaran mata uang. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah

Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa penukaran mata uang diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan broker asuransi dan reasuransi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa broker asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.12 Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah property berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak

rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m². NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Susenas dan Sensus Penduduk, BPS (imputasi sewa rumah). Sedangkan data produksi usaha persewaan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil penelitian asosiasi. Struktur input pada usaha persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ), BPS.

2.13 Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Jasa Hukum

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa

Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya, termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

Periklanan

Periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media, termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

Jasa Penyaluran Tenaga Kerja

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan lainnya.

Jasa Kebersihan Umum Bangunan

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode revaluasi. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa jumlah tenaga kerja diperoleh dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini, meskipun dilakukan oleh badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistem sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta

jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi. Dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

Data bersumber dari Realisasi APBN Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; Realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah daerah (K1, K2, K3), BPS; Realisasi APBD, Biro Keuangan Pemerintah Daerah; Jumlah pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

2.15 Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan produksi. Untuk NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Berbagai Survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Pengeluaran BPS; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh

tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan social mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintahatas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Kesehatan; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); Berbagai Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran BPS; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

2.17 Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk

perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ ekstrapolasi dengan deflator/ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/ indeks indikator produksi yang sesuai.

Sumber data produksi Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan data penunjang intern BPS (Ketenagakerjaan, Susenas, Sensus Ekonomi, Statistik Harga Konsumen, dan Survei-survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran).

Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah IHK Umum.

Data diperoleh dari internal BPS (Sensus Ekonomi, Subdit Statistik Demografi, Susenas, and Subdirektorat Statistik Harga Konsumen).

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T mencakup kegiatan yang memanfaatkan jasa perorangan untuk melayani rumah tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan Kegiatan Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan (didalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran perkapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB-nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan hasil survei intern BPS (SKTIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Sumber data kategori ini diperoleh dari intern BPS, yaitu, Susenas, Sensus Penduduk, Subdirektorat Pertambangan, Energi dan Konstruksi (Publikasi Statistik Air Bersih), dan Survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Pengeluaran.

Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The Internasional Moneter Fund, The World Bank, The World Health Organization(WHO), the Organization for Economic Co-operation and Development(OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries(OPEC) dan lain-lain.

Output dan NTB berlaku diperoleh dengan pendekatan biaya yang didapatkan dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya. Sementara, untuk output konstan diperoleh dengan metode deflasi dengan deflator laju IHK umum.

Sumber data diperoleh dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya yang berkantor pusat di Indonesia dan Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.



BAB III

TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN LUWU TIMUR

PERKEMBANGAN
PEREKONOMIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2017

BAB III

TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN LUWU TIMUR

3.1. Produk Domestik Regional Bruto

Selama lima tahun terakhir PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga berlaku (adhb) terus meningkat. Dari 16,66 trilyun rupiah pada tahun 2013 hingga mencapai 20,25 trilyun tahun 2017. Dalam kurun waktu tersebut, nilainya tidak selalu meningkat setiap tahun. Terlihat pada tabel 3.1, tren naik terjadi pada tahun 2013-2015, sementara pada tahun 2016 menurun dengan selisih sekitar 143,23 miliar rupiah dengan tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan signifikan sebesar 1.177,03 milyar.

Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013-2017

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)
2013	16.662.673,5	12.717.284,6
2014	19.027.930,5	13.748.017,8
2015	19.216.561,8	14.631.058,7
2016^{*)}	19.073.331,3	14.862.310,8
2017^{**)}	20.250.364,6	15.318.716,5

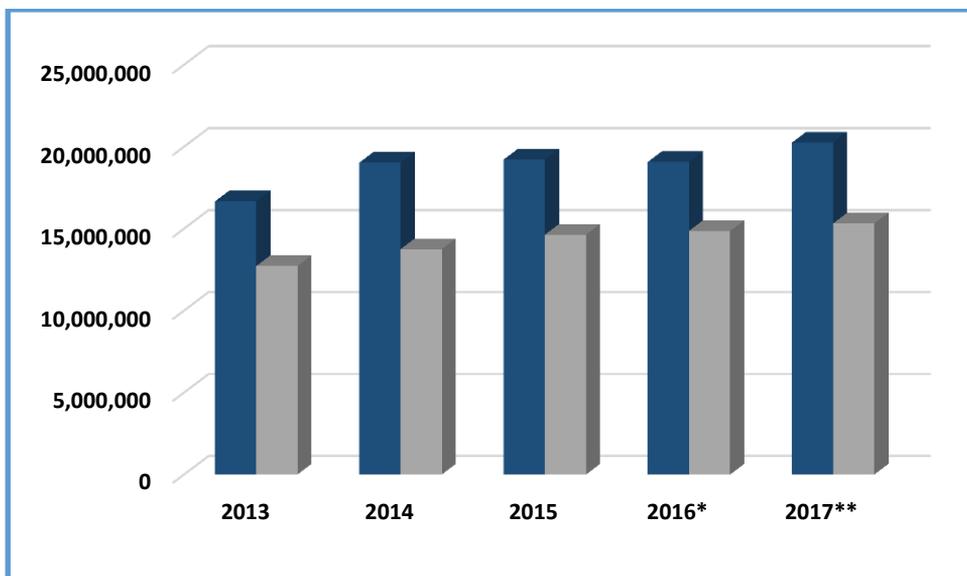
Catatan :^{*)} Angka sementara

^{**)}Angka sangat sementara

Sumber : PDRB kabupaten Luwu Timur 2013-2017

Nilai PDRB atas dasar harga konstan (adhk) menunjukkan perkembangan yang berbeda dengan PDRB adhb. Dari tahun 2013 hingga 2017, nilainya terus meningkat. Pada tahun 2013, total nilai tambah bruto adhk di Kabupaten Luwu Timur mencapai 12,72 trilyun rupiah. Tahun berikutnya, total nilai tambah yang dihasilkan meningkat 1,03 trilyun rupiah (68,1 persen). Tren naik tersebut terus bertahan hingga tahun 2017, meskipun selisih nilainya hanya 456,40 miliar rupiah atau meningkat 3,07 persen dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.1 PDRB Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2013-2017 (juta rupiah)



Catatan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber : PDRB Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Pada tabel 3.2 menunjukkan bahwa kategori *Pertambangan dan Penggalan* masih menjadi kategori yang mampu memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Nilai kategori ini didominasi subkategori *Pertambangan Bijih Logam (Nikel)*.

Kontribusi yang diberikan oleh kategori *Pertambangan dan Penggalan* atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 sebesar 10,86 trilyun rupiah. Dimana 10,58 trilyun berasal dari subkategori *Pertambangan Bijih Logam (nikel)*. Sedangkan atas dasar harga konstan 2010 kategori ini mampu memberikan kontribusinya sebesar 8,78 trilyun rupiah, atau sekitar 98,63 persen ntb pertambangan dan penggalan berasal dari pertambangan nikel.

Tabel 3.2 PDRB Menurut Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017

Lapangan Usaha	PDRB (Juta Rupiah)	
	ADHB	ADHK 2010
(1)	(2)	(3)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.312.100,1	2.838.604,0
B. Pertambangan dan Penggalian	10.864.591,8	8.782.746,3
C. Industri Pengolahan	635.626,1	430.907,2
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8.966,8	9.091,6
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.230,0	1.051,6
F. Konstruksi	1.638.672,5	1.184.826,1
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	697.815,7	555.164,6
H. Transportasi dan Pergudangan	132.112,5	91.413,9
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36.422,3	22.862,0
J. Informasi dan Komunikasi	255.449,4	241.297,3
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	165.738,3	126.056,5
L. Real Estate	438.878,9	261.709,3
M, N. Jasa Perusahaan	9.445,3	6.401,6
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	439.631,3	294.124,7
P. Jasa Pendidikan	368.418,8	272.676,0
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	222.666,6	184.291,0
R, S, T, U. Jasa lainnya	22.598,1	15.493,0
PDRB	20.250.364,6	15.318.716,5

Catatan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber : PDRB Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Kontribusi terkecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah kategori *Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang*. Atas dasar harga berlaku,

pada tahun 2017 kategori ini hanya mampu memberikan sumbangannya sekitar 1,23 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2010 kontribusi yang diberikan hanya sekitar 1,05 miliar rupiah terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur.

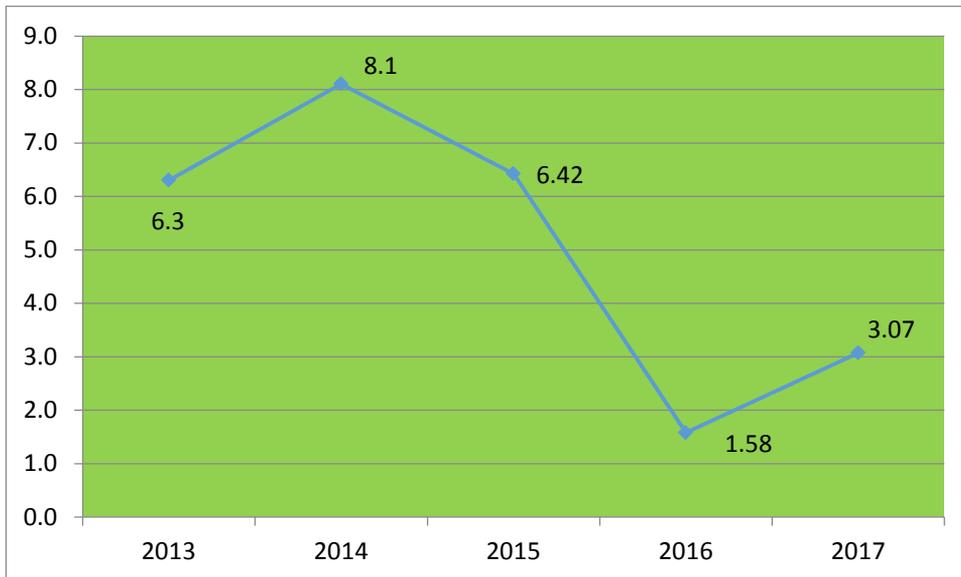
3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan keluaran dalam suatu perekonomian. Selain itu, indikator ini juga memberi indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian selama periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Indikasi tersebut tersirat dalam pertumbuhan keluaran, karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Pada gilirannya, proses ini tentunya juga akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor-faktor produksi yang dikuasai masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat yang menguasai faktor-faktor produksi juga akan meningkat.

Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Dengan demikian angka pertumbuhan yang diperoleh semata-mata mencerminkan pertumbuhan riil yang dihasilkan oleh aktivitas perekonomian pada periode tertentu dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan.

Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar 6,30 persen. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa pada kategori *Pertambangan dan Penggalian* terdapat sub kategori *Pertambangan Bijih Logam*, yaitu nikel (dikelola oleh PT. Vale, tbk), yang menghasilkan NTB terbesar dan mendominasi pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur. Pada tahun tersebut, produktivitas subkategori pertambangan nikel cukup baik. Kinerja operasional PT. Vale yang semakin baik dan didukung bertambahnya kapasitas produksi sejalan dengan diselesaikannya proyek peningkatan Tanur Listrik 2 pada triwulan kedua tahun sebelumnya.

Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013-2017 (persen)



Catatan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber: PDRB Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Tahun-tahun berikutnya kenaikan produksi dan penurunan biaya produksi mampu meningkatkan nilai tambah nikel cukup signifikan. Pengaruhnya terhadap PDRB Kabupaten Luwu Timur terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang semakin melaju. Hingga tahun 2014 pertumbuhan ekonomi mencapai 8,10 persen. Namun pada tahun 2015, pertumbuhan sedikit melambat. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2014, produktivitas PT. Vale merupakan yang terbaik selama berdirinya perusahaan tersebut. Dalam laporan tahunannya, PT. Vale menyebutkan bahwa produksi yang dicapai pada tahun 2014 merupakan pemecah rekor produksi sepanjang sejarah berdirinya perseroan. Sehingga bukan hal yang mudah untuk mengulang di tahun berikutnya. Namun ternyata, pada tahun 2015 rekor produksi kembali terpecahkan, hanya laju pertumbuhannya tidak secepat tahun sebelumnya. Sehingga karena begitu besarnya dominasi sub kategori tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2015 ikut melambat menjadi 6,42 persen. Pada tahun 2016, perlambatan pertumbuhan masih terjadi, bahkan selisihnya mencapai 4,84 poin dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan 1,58 persen tersebut (2016) terjadi karena berkurangnya produksi nikel dalam matte dan menurunnya harga

realisasi rata-rata nikel di pasar dunia yang sangat signifikan. Pada tahun 2017 ada sedikit peningkatan produktivitas dari tahun sebelumnya sehingga berkontribusi dalam mengangkat pertumbuhan menjadi 3,07 persen.

Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013- 2017

Kategori	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,33	9,08	8,39	8,15	2,91
B. Pertambangan dan Penggalian	5,28	8,90	5,24	-2,23	1,72
C. Industri Pengolahan	11,56	10,55	7,45	7,85	4,26
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10,74	14,16	5,46	14,19	7,30
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,47	1,82	0,17	5,44	12,07
F. Konstruksi	11,74	2,31	8,32	6,75	6,09
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,04	4,09	8,59	8,29	8,99
H. Transportasi dan Pergudangan	7,73	10,62	7,55	3,76	6,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21,57	4,42	6,06	9,01	5,36
J. Informasi dan Komunikasi	16,82	5,86	10,68	9,01	9,85
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	11,28	10,23	5,51	6,19	3,67
L. Real Estate	10,64	12,79	7,39	7,30	6,61
M,N. Jasa Perusahaan	8,65	3,50	5,87	7,50	6,55
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,13	1,87	8,91	1,73	6,70
P. Jasa Pendidikan	15,73	3,15	7,25	6,30	5,30
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,61	7,27	9,31	7,09	7,60
R,S,T,U. Jasa lainnya	6,74	7,48	8,99	9,10	9,53
PDRB	6,30	8,10	6,42	1,58	3,07

Catatan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber: PDRB Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Dari tabel 3.3, nampak bahwa selama kurun waktu 2013-2017, umumnya pertumbuhan kategori bisa dikatakan berfluktuasi. Pada tahun 2017 dari 17 kategori, 8

diantaranya mengalami percepatan pertumbuhan, yaitu kategori *Pertambangan dan Penggalian*, kategori *Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang*, kategori *Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor*, kategori *Transportasi dan Pergudangan*, kategori *Informasi dan Komunikasi*, kategori *Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib*, kategori *Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial*, dan kategori *Jasa Lainnya*. Pertumbuhan riil ekonomi kategori *Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang* tumbuh paling tinggi dibanding dengan kategori yang lain, yaitu sekitar 12,07 persen. Kategori ini juga mengalami peningkatan pertumbuhan tertinggi yaitu 6,63 poin. Lebih banyaknya kategori yang tumbuh melambat dari tahun lalu dibandingkan dengan kategori yang mengalami percepatan pertumbuhan, memperlihatkan bahwa secara umum, kondisi perekonomian di Luwu Timur sedang menurun.

3.3 Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian suatu wilayah sangat ditentukan oleh besarnya peranan kategori-kategori ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Komposisi PDRB atas dasar harga berlaku yang terbentuk dari setiap kategori serta besarnya kontribusi yang diberikan oleh kategori tersebut dalam pembentukan PDRB, dapat memberikan gambaran struktur perekonomian dari wilayah tersebut. Semakin besar peranan suatu kategori ekonomi terhadap pembentukan total PDRB, semakin besar pula pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan perekonomian suatu wilayah.

Pada tabel 3.4 terlihat bahwa kategori *Pertambangan dan Penggalian* masih menjadi kategori dominan dalam perekonomian di Kabupaten Luwu Timur. Pada tahun 2017, kontribusi kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur mencapai 53,65 persen. Sedangkan kategori *Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan* yang umumnya menjadi kategori unggulan hampir di semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, menempati urutan kedua. Kategori ini mampu memberikan kontribusinya sekitar 21,29 persen. Meskipun tidak mendominasi, namun kategori ini juga cukup berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Luwu Timur. Penyumbang terbesar ketiga yaitu kategori *Konstruksi* dengan persentase berkisar antara 6-8 persen. Sementara kategori

Perkembangan Perekonomian

KABUPATEN LUWU TIMUR 2017

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan kategori Industri Pengolahan berada di bawahnya dengan kontribusi berkisar pada 2-3 persen.

Tabel 3.4 Struktur Perekonomian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013–2017(persen)

Kategori	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,90	16,76	19,39	21,79	21,29
B. Pertambangan dan Penggalian	64,68	63,95	58,28	53,41	53,65
C. Industri Pengolahan	2,30	2,45	2,88	3,27	3,14
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F. Konstruksi	6,48	6,31	7,32	7,93	8,09
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,73	2,50	2,89	3,33	3,45
H. Transportasi dan Pergudangan	0,47	0,51	0,62	0,66	0,65
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,14	0,14	0,16	0,17	0,18
J. Informasi dan Komunikasi	1,05	0,99	1,08	1,22	1,26
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,52	0,56	0,67	0,79	0,82
L. Real Estate	1,45	1,65	1,93	2,19	2,17
M,N. Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,72	1,68	1,97	2,08	2,17
P. Jasa Pendidikan	1,56	1,49	1,65	1,83	1,82
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,83	0,85	1,00	1,13	1,10
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,08	0,08	0,09	0,11	0,11
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

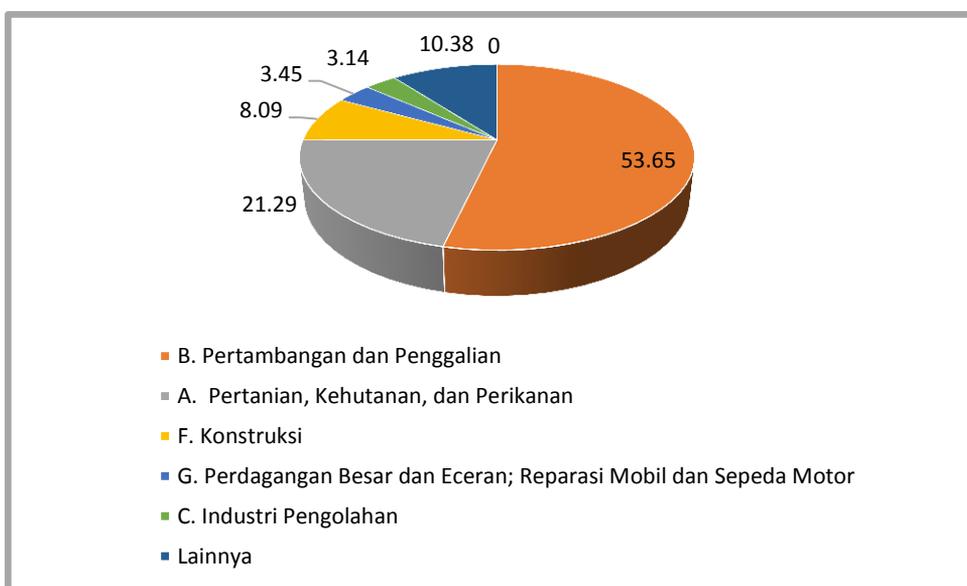
*¹) Angka sementara

**²) Angka sangat sementara

Sumber : PDRB Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Sebagaimana yang terlihat pada tabel 3.4 di atas, untuk tahun 2017, kontribusi yang diberikan oleh kategori lain, selain kelima kategori di atas terbilang kecil. Bahkan tujuh kategori kontribusinya masih di bawah 1 persen, antara lain kategori *Pengadaan Listrik dan Gas*, kategori *Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang*, kategori *Transportasi dan Pergudangan*, dll. Bukan hanya pada tahun 2017 saja, share dari ketujuh kategori ini pada tahun-tahun sebelumnya memang masih di bawah angka 1 persen. Bila kontribusi dari kategori selain *Pertambangan dan Penggalian*, kategori *Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan*, kategori *Konstruksi*, kategori *Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor* dan kategori *Industri Pengolahan* dijumlahkan (12 kategori), persentasenya hanya mencapai 10,38.

Gambar 3.3 Struktur Perekonomian Kabupaten Luwu Timur, 2017 (persen)



Sumber : PDRB Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

3.4. PDRB Perkapita

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah PDRB perkapita. Indikator ini merupakan gambaran nilai tambah yang dapat diciptakan oleh setiap penduduk sebagai akibat dari adanya aktivitas produksi. Meskipun indikator ini belum bisa menggambarkan pendapatan perkapita penduduk

suatu wilayah, namun kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonominya dapat diukur dengan tingkat pendapatan riil masyarakat perkapita. PDRB perkapita dihasilkan dari PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun daerah tersebut. Bila pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk, maka PDRB perkapita akan naik, namun sebaliknya bila pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, maka PDRB perkapita akan turun.

Tabel 3.5 PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013–2017 (rupiah)

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
(1)	(2)	(3)
2013	63.353.282	48.352.488
2014	70.629.463	51.031.042
2015	69.727.542	53.088.985
2016^{*)}	67.678.646	52.736.517
2017^{**)}	70.344.542	53.213.269

^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

Sumber : PDRB kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Dampak dari adanya pertambangan nikel di Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, PDRB perkapita Kabupaten Luwu Timur menjadi sangat tinggi. Hal ini perlu dipahami sangat hati-hati karena angka perkapita tersebut belum tentu dapat dinikmati oleh penduduk secara riil. Artinya pendapatan tersebut "nisbi" disebabkan oleh tidak semua penduduk terlibat secara langsung dalam proses produksi pertambangan.

Dari tabel 3.5 di atas, terlihat bahwa angka PDRB perkapita adhb selama kurun waktu 2013-2017 berfluktuasi. Tahun 2013 hingga 2014 nilainya terus meningkat, dari 63,35 juta rupiah hingga mencapai 70,63 juta rupiah. Namun 2 tahun berikutnya, semakin menurun hingga pada tahun 2016, nilainya menjadi 67,68 juta rupiah. Pada tahun 2017 nilainya kembali meningkat hingga mencapai 70,34 juta rupiah dan angka ini sekaligus menempatkan Kabupaten Luwu Timur pada urutan kedua setelah Kotamadya Makassar.

Sementara atas dasar harga konstan, tren naik terjadi selama tahun 2013-2015. Dari 48,35 juta rupiah, terus meningkat hingga menjadi 53,09 juta rupiah. Tahun berikutnya, nilai tersebut turun menjadi 52,74 juta rupiah dan kembali naik pada tahun 2017 menjadi 53,21 juta rupiah.

3.5. PDRB Kabupaten Luwu Timur Tanpa NTB Subkategori Pertambangan Bijih Logam

Kategori yang sangat dominan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur adalah kategori *Pertambangan dan Penggalian*, khususnya subkategori *Pertambangan Bijih Logam*. Akan tetapi pada kenyataannya hanya sebagian kecil masyarakat saja yang dapat ikut menikmati besarnya nilai tambah tersebut. Untuk melihat besarnya nilai tambah yang berhasil diciptakan dan yang akan dinikmati oleh masyarakat secara umum perlu disajikan tabel PDRB dengan mengeluarkan pertambangan nikel dalam penghitungannya.

Tabel 3.6 PDRB Kabupaten Luwu Timur 2013–2017 Tanpa NTB Subkategori Pertambangan Bijih Logam

Tahun	PDRB Adhb (Juta Rupiah)	PDRB Adhk 2010 (Juta Rupiah)	PDRB Perkapita (Rupiah)	Pertumbuhan (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	6.031.098,10	5.124.259,56	22.930.886	7,98
2014	7.056.179,31	5.481.666,84	26.191.716	6,97
2015	8.265.414,90	5.938.930,40	29.991,164	8,34
2016^{*)}	9.158.134,20	6.378.858,00	32.496.165	7,41
2017^{**)}	9.669.346,61	6.691.827,40	33.588.815	4,91

^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

Sumber : PDRB Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Pada tahun 2017 PDRB Kabupaten Luwu Timur adhb mencapai 20,25 trilyun rupiah. Ketika nilai tambah subkategori *Pertambangan Bijih Logam* tidak disertakan hanya tersisa sedikit lebih kecil dari seperduanya. Begitu pula halnya dengan PDRB adhk 2010 dan PDRB Perkapita. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung tanpa menyertakan nilai tambah nikel selama kurun waktu 5 tahun terlihat cukup stabil pada empat tahun pertama berkisar antara 6-8 persen per tahun. Namun pada tahun 2017 mengalami perlambatan dan hanya mencapai angka 4,91 persen. Pertumbuhan melambat tersebut terutama berasal dari kategori *Pertanian, Kehutanan dan Perikanan* sementara kategori ini kontribusinya urutan kedua terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur setelah kategori *Pertambangan dan Penggalian*.



BAB IV

**PERBANDINGAN PDRB KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERKEMBANGAN
PEREKONOMIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2017

BAB IV
PERBANDINGAN PDRB KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

4.1. Produk Domestik Regional Bruto

Kontribusi PDRB Kabupaten Luwu Timur terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Perbandingan PDRB Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017

T a h u n	PDRB (Juta Rupiah)		% terhadap PDRB Sulsel
	Kab. LuwuTimur	Prop. Sulsel	
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	16.662.673,54	258.836.416,19	6,44
2014	19.027.930,49	298.033.804,83	6,38
2015	19.216.561,81	340.390.214,27	5,65
2016 ^{*)}	19.073.331,30	379.632.264,91	5,02
2017 ^{**)}	20.250.364,64	418.931.582,29	4,83

Catatan :^{*)} Angka sementara

^{**)}Angka sangat sementara

Sumber : PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Pada tabel 4.1 diatas terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir kontribusi PDRB Kabupaten Luwu Timur terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku mengalami penurunan setiap tahunnya, sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan berpluktuasi. Kontribusi yang diberikan Kabupaten Luwu Timur terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 atas dasar harga berlaku turun 0,19 persen sementara atas dasar harga konstan menunjukkan sedikit peningkatan disbanding tahun sebelumnya. Tren penurunan selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur lebih lambat dari Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 4.2 Perbandingan PDRB Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2017

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)		% terhadap PDRB Sulsel
	Kab. Luwu Timur	Prop. Sulsel	
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	12.717.284,64	217.589.132,10	5,84
2014	13.748.017,75	233.988.050,61	5,88
2015	14.631.058,73	250.802.993,05	5,83
2016 ^{*)}	14.862.310,82	269.432.089,13	5,52
2017 ^{**)}	15.318.716,53	288.908.616,10	5,53

Catatan :^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

Sumber : PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

4.2. PDRB Menurut Kategori Lapangan Usaha

Untuk dapat mengetahui seberapa besar peranan masing-masing kategori/lapangan usaha di Kabupaten Luwu Timur terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada kategori/lapangan usaha yang bersangkutan, maka disajikan perbandingan diantara keduanya. Dari sini pula dapat diketahui kategori potensi (unggulan) yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur yang dapat diberikan secara maksimal terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada tabel 4.3 nampak bahwa Kategori *Pertambangan dan Penggalian* mampu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Atas dasar harga berlaku tahun 2017 kontribusi yang diberikan kategori ini mencapai 48,34 persen dan atas dasar harga konstan 2010 sharenya mencapai 52,53 persen. Kategori pemberi kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan adalah kategori *Pertanian, Kehutanan dan Perikanan*. Kontribusi yang diberikan oleh kategori ini pada tahun 2017 atas dasar harga berlaku mencapai 4,50 persen dan atas dasar harga konstan 2010 kontribusinya mencapai 4,62 persen.

Tabel 4.3 Perbandingan PDRB Menurut Kategori/Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kategori	Luwu Timur (milyarRp)		Sulawesi Selatan (milyarRp)		% ThdSul-Sel	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.312,10	2.838,60	95.895,43	61.468,51	4,50	4,62
B. Pertambangan dan Penggalian	10.864,59	8.782,75	22.474,98	16.718,89	48,34	52,53
C. Industri Pengolahan	635,63	430,91	57.449,33	40.407,19	1,11	1,07
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8,97	9,09	430,77	272,65	2,08	3,33
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,23	1,05	394,00	344,53	0,31	0,30
F. Konstruksi	1.638,67	1.184,83	53.386,35	34.758,35	3,07	3,41
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	697,82	555,16	58.381,45	42.479,22	1,20	1,31
H. Transportasi dan Pergudangan	132,11	91,41	17.514,08	10.675,51	0,75	0,86
I. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	36,42	22,86	5.696,25	4.081,80	0,64	0,56
J. Informasi dan Komunikasi	255,45	241,30	19.933,01	18.776,94	1,28	1,29
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	165,74	126,06	15.797,24	10.275,00	1,05	1,23
L. Real Estate	438,88	261,71	16.151,29	10.222,29	2,72	2,56
M,N. Jasa Perusahaan	9,45	6,40	1.845,25	1.239,45	0,51	0,52
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	439,63	294,12	18.194,82	11.926,37	2,42	2,47
P. Jasa Pendidikan	368,42	272,68	21.756,45	15.685,09	1,69	1,74
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	222,67	184,29	8.188,61	5.717,08	2,72	3,22
R,S,T,U. Jasa lainnya	22,60	15,49	5.567,57	3.859,79	0,41	0,40
PDRB	20.250,36	15.317,72	418.931,58	288.908,62	4,83	5,30

Catatan : ***) Angka sangat sementara

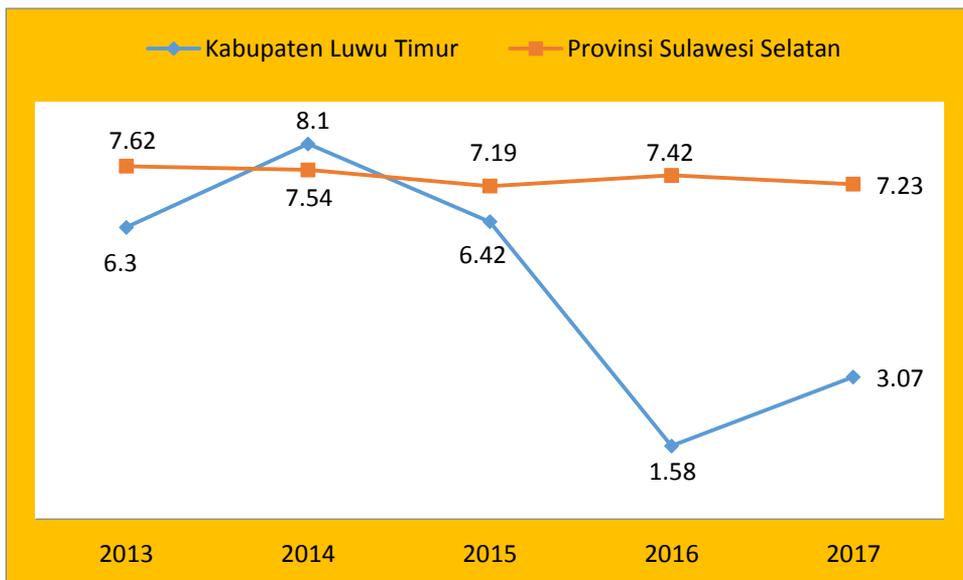
Sumber : PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

4.3. Pertumbuhan Ekonomi

Selama kurun waktu 2013-2017, perbedaan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Luwu Timur cukup signifikan dan kadang berlawanan arah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur sangat dipengaruhi pertumbuhan kategori *Pertambangan dan Penggalian*, karena kontribusi sub kategori ini cukup dominan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur. Berbeda dengan Provinsi Sulawesi Selatan, kategori tersebut hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan kategori *Pertambangan dan Penggalian* saja.

Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan, 2013-2017 (persen)



Catatan :*) Angka sementara

**)Angka sangat sementara

Sumber : PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur meningkat tajam bahkan bisa melampaui Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara pertumbuhan provinsi saat itu justru melambat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir semua kategori di Kabupaten Luwu Timur melaju lebih cepat melampaui pertumbuhan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2015, grafik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan kembali searah. Kedua wilayah tersebut sama-sama mengalami perlambatan pertumbuhan. Sementara tahun berikutnya, ketika pertumbuhan rata-rata di

Provinsi Sulawesi Selatan terlihat meningkat, Kabupaten Luwu Timur justru menunjukkan perlambatan yang cukup signifikan. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar kategori mengalami perlambatan sehingga dampaknya sangat terlihat pada pertumbuhan secara umum. Meskipun pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan, sementara provinsi Sulawesi Selatan mengalami perlambatan, namun laju pertumbuhan Kabupaten Luwu Timur belum bisa mencapai pertumbuhan Provinsi bahkan masih tertinggal jauh.

4.4. PDRB Perkapita

Pertambangan nikel yang berada di Sorowako Kecamatan Nuha, menyebabkan PDRB perkapita Kabupaten Luwu Timur yang terbentuk menjadi sangat tinggi. Lebih tinggi dibanding kabupaten-kabupaten lain, bahkan dengan PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan sekalipun. Pada tahun 2017 atas dasar harga berlaku PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur telah mencapai 70,34 juta rupiah, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan baru mencapai angka 48,21 juta rupiah. Atas dasar harga konstan 2010, PDRB perkapita Kabupaten Luwu Timur mencapai 53,21 juta rupiah, sedangkan PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan masih sekitar 33,24 juta rupiah.

Tabel 4.4 Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan, 2013-2017 (juta rupiah)

Tahun	Luwu Timur		Sulawesi Selatan	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	63,35	48,35	31,03	26,08
2014	70,63	51,03	35,34	27,75
2015	69,73	53,09	39,95	29,44
2016 ^{*)}	67,68	52,74	44,11	31,31
2017 ^{**)}	70,34	53,21	48,21	33,24

^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

Sumber : PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

4.5. Posisi Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Masing-masing daerah tersebut tentu memiliki potensi yang berbeda satu sama lain. Dengan menggunakan indikator makro ekonomi yang sama yaitu PDRB, potensi tersebut dapat diukur dan dibandingkan. Sehingga dapat dilihat posisi kabupaten/kota yang satu terhadap yang lain di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 4.5 PDRB Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan Tahun 2017)**

Kabupaten/Kota	PDRB (Juta Rupiah)		Pertumbuhan (%)	Kontribusi terhadap provinsi (%)
	ADHB	ADHK 2010		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Kepulauan Selayar	5.276.743,51	3.147.388,58	7,61	1,26
02. Bulukumba	12.174.855,20	7.734.710,29	6,92	2,91
03. Bantaeng	6.951.076,49	4.694.358,86	7,32	1,66
04. Jeneponto	8.645.022,92	5.967.176,40	8,26	2,06
05. Takalar	8.576.540,04	5.804.573,73	7,39	2,05
06. Gowa	17.271.382,57	11.977.299,62	7,23	4,12
07. Sinjai	9.189.912,49	6.218.715,48	7,23	2,19
08. Maros	19.451.379,32	12.768.318,40	6,81	4,64
09. Pangkajene Kepulauan	22.309.718,23	15.433.504,47	6,60	5,33
10. Barru	5.970.101,11	4.169.983,81	6,48	1,43
11. Bone	29.405.396,27	18.974.053,12	8,43	7,02
12. Soppeng	8.947.107,05	6.012.107,71	8,34	2,14
13. Wajo	17.897.717,74	12.229.036,00	5,22	4,27
14. Sidenreng Rappang	11.955.377,83	7.693.463,15	7,11	2,85
15. Pinrang	16.411.362,33	11.213.633,50	7,85	3,92
16. Enrekang	6.412.457,10	4.168.967,63	6,89	1,53
17. Luwu	13.041.819,79	8.567.872,02	6,79	3,11
18. Tana Toraja	6.084.149,83	3.942.601,92	7,50	1,45
19. Luwu Utara	10.800.790,73	7.081.166,34	7,60	2,58
20. Luwu Timur	20.250.364,64	15.318.716,53	3,07	4,83
21. Toraja Utara	7.788.794,40	4.422.645,62	8,22	1,86
22. Makassar	143.128.684,24	103.857.089,20	8,23	34,17
23. Parepare	6.111.149,27	4.394.795,39	6,99	1,46

24.	Palopo	6.550.688,67	4.746.935,70	7,19	1,56
-----	--------	--------------	--------------	------	------

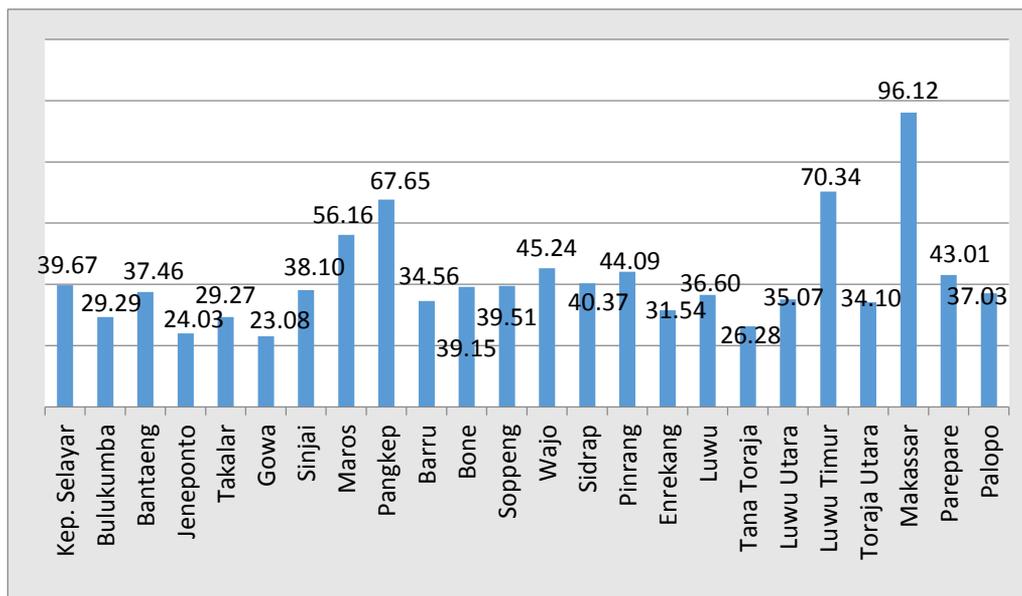
Catatan :**)Angka sangat sementara

Sumber : PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Dari tabel 4.5 terlihat bahwa ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar, menempati urutan pertama dengan nilai PDRB adhb mencapai lebih dari 100 trilyun rupiah, jauh meninggalkan kabupaten/kota yang lain. Kabupaten Bone dan Pangkajene Kepulauan menyusul dengan PDRB adhb mencapai 29,41 trilyun rupiah dan 22,31 trilyun rupiah. Sementara Kabupaten Luwu Timur menempati posisi keempat. Nilai PDRB terkecil dimiliki oleh Kabupaten Selayar dengan 5,28 trilyun rupiah.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sulawesi Selatan bervariasi. Dari 3,07 persen (Kabupaten Luwu Timur) hingga 8,83 persen (Kabupaten Bone). Dari tabel di atas terlihat pula pertumbuhan ekonomi di 9 kabupaten/kota lebih rendah dari pertumbuhan provinsi.

Gambar 4.2 PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2017) (juta rupiah)**



Catatan :**)Angka sangat sementara

Sumber : PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Kabupaten Luwu Timur memiliki PDRB Perkapita yang sangat tinggi. Hal ini tampak jelas pada gambar 4.2 di

atas. Diagram batang yang tampak menjulang adalah milik Kota Makassar dan Kabupaten Luwu Timur. Dengan selisih 25,78 juta rupiah dari Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur menempati posisi kedua. Meskipun nilai PDRB adhb Kabupaten Bone dan Pangkajene Kepulauan lebih tinggi dari Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi penduduk kedua kabupaten tersebut sebagai faktor pembagi dalam penghitungan PDRB perkapita, jumlahnya jauh lebih besar dari penduduk kabupaten Luwu Timur. Pada tahun 2017 penduduk Kabupaten Bone dan Pangkajene Kepulauan telah mencapai 746.973 jiwa dan 326.700 jiwa, sementara Kabupaten Luwu Timur hanya 287.874 jiwa. Demikian halnya dengan Kabupaten Selayar, meskipun memiliki nilai PDRB terkecil di Sulawesi Selatan namun PDRB perkapitanya masih menempati urutan ke 9 dari 24 kabupaten/kota. Di sisi lain, Kabupaten Gowa yang berada di peringkat 7 untuk nilai PDRB adhb, memiliki PDRB perkapita terkecil, yaitu hanya sekitar 23,08 juta jiwa.



LAMPIRAN

PERKEMBANGAN
PEREKONOMIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2017

TABEL 1.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA
KABUPATEN LUWU TIMUR
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2013-2017** (JutaRp)

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.649.890,0	3.189.638,1	3.725.978,2	4.156.733,9	4.312.100,1
B	Pertambangan dan Penggalian	10.777.928,7	12.167.503,5	11.198.466,2	10.187.884,9	10.864.591,8
C	Industri Pengolahan	383.343,1	466.159,9	553.484,2	623.287,6	635.626,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.180,8	6.182,5	6.319,7	7.364,6	8.966,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	929,0	963,4	1.003,0	1.151,3	1.230,0
F	Konstruksi	1.079.970,0	1.200.241,4	1.405.738,4	1.511.622,5	1.638.672,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	454.819,0	475.484,5	555.287,9	635.042,9	697.815,7
H	Transportasi dan Pergudangan	78.297,3	97.668,2	119.936,3	126.788,9	132.112,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23.878,2	27.027,4	30.019,8	33.255,8	36.422,3
J	Informasi dan Komunikasi	175.451,4	187.704,1	207.000,3	231.857,2	255.449,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	86.272,8	107.367,1	129.028,1	150.075,8	165.738,3
L	Real Estate	242.165,1	314.814,6	371.171,9	416.987,1	438.878,9
M,N	Jasa Perusahaan	6.311,9	6.908,7	7.907,0	8.777,5	9.445,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	287.386,5	318.727,6	378.360,6	397.311,9	439.631,3
P	Jasa Pendidikan	259.153,0	284.236,8	317.299,2	349.432,5	368.418,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	138.793,3	162.011,5	191.615,8	215.415,1	222.666,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	12.903,6	15.291,1	17.945,1	20.341,8	22.598,1
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	16.662.673,5	19.027.930,5	19.216.561,8	19.073.331,3	20.250.364,6

Keterangan

*) : Angka sementara

**) : Angka Sangat Sementara

TABEL 1.2 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA
KABUPATEN LUWU TIMUR
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 TAHUN 2013-2017** (Juta Rp)

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.157.280,4	2.353.141,3	2.550.575,3	2.758.455,2	2.838.604,0
B	Pertambangan dan Penggalian	7.706.179,6	8.392.371,7	8.831.737,2	8.634.509,7	8.782.746,3
C	Industri Pengolahan	322.604,5	356.641,7	383.210,1	413.305,7	430.907,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.162,9	7.035,5	7.419,9	8.473,1	9.091,6
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	872,6	888,5	890,0	938,4	1.051,6
F	Konstruksi	944.127,9	965.940,7	1.046.265,5	1.116.861,8	1.184.826,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	416.164,5	433.186,1	470.403,5	509.385,6	555.164,6
H	Transportasi dan Pergudangan	69.598,5	76.989,6	82.802,6	85.919,6	91.413,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17.973,6	18.767,8	19.905,1	21.699,3	22.862,0
J	Informasi dan Komunikasi	172.006,1	182.081,1	201.522,1	219.670,4	241.297,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	98.448,7	108.523,7	114.505,8	121.592,5	126.056,5
L	Real Estate	188.881,2	213.033,6	228.776,5	245.477,2	261.709,3
M,N	Jasa Perusahaan	5.100,3	35.278,8	5.588,8	6.008,0	6.401,6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	244.236,9	248.809,8	270.973,9	275.662,5	294.124,7
P	Jasa Pendidikan	220.189,6	227.123,4	243.594,0	258.940,5	272.676,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	136.389,4	146.309,0	159.923,1	171.266,2	184.291,0
R,S,T,U	Jasa lainnya	11.068,0	11.895,6	12.965,3	14.145,2	15.493,0
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	12.717.284,6	13.748.017,8	14.631.058,7	14.862.310,8	15.318.716,5

Keterangan

*) : Angka sementara

**) : Angka Sangat Sementara

TABEL 1.3 DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT
LAPANGAN USAHA
KABUPATEN LUWU TIMUR ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2013-2017** (%)

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,90	16,76	19,39	21,79	21,29
B	Pertambangan dan Penggalian	64,68	63,95	58,28	53,41	53,65
C	Industri Pengolahan	2,30	2,45	2,88	3,27	3,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	6,48	6,31	7,32	7,93	8,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,73	2,50	2,89	3,33	3,45
H	Transportasi dan Pergudangan	0,47	0,51	0,62	0,66	0,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,14	0,14	0,16	0,17	0,18
J	Informasi dan Komunikasi	1,05	0,99	1,08	1,22	1,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,52	0,56	0,67	0,79	0,82
L	Real Estate	1,45	1,65	1,93	2,19	2,17
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,72	1,68	1,97	2,08	2,17
P	Jasa Pendidikan	1,56	1,49	1,65	1,83	1,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,83	0,85	1,00	1,13	1,10
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,08	0,08	0,09	0,11	0,11
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan

*) : Angka sementara

**) : Angka Sangat Sementara

TABEL 1.4 LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT
LAPANGAN USAHA
KABUPATEN LUWU TIMUR ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2013-2017** (%)

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,33	9,08	8,39	8,15	2,91
B	Pertambangan dan Penggalian	5,28	8,90	5,24	-2,23	1,72
C	Industri Pengolahan	11,56	10,55	7,45	7,85	4,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,74	14,16	5,46	14,19	7,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,47	1,82	0,17	5,44	12,07
F	Konstruksi	11,74	2,31	8,32	6,75	6,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,04	4,09	8,59	8,29	8,99
H	Transportasi dan Pergudangan	7,73	10,62	7,55	3,76	6,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21,57	4,42	6,06	9,01	5,36
J	Informasi dan Komunikasi	16,82	5,86	10,68	9,01	9,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,28	10,23	5,51	6,19	3,67
L	Real Estate	10,64	12,79	7,39	7,30	6,61
M,N	Jasa Perusahaan	8,65	3,50	5,87	7,50	6,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,13	1,87	8,91	1,73	6,70
P	Jasa Pendidikan	15,73	3,15	7,25	6,30	5,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,61	7,27	9,31	7,09	7,60
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,74	7,48	8,99	9,10	9,53
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,30	8,10	6,42	1,58	3,07

Keterangan

*) : Angka sementara

**) : Angka Sangat Sementara

TABEL 1.5 LAJU PERTUMBUHAN INDEKS HARGA IMPLISIT PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO
MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN LUWU TIMUR, TAHUN 2013-2017** (%)

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,42	10,35	7,77	3,15	0,81
B	Pertambangan dan Penggalian	0,90	3,66	-12,54	-6,95	4,84
C	Industri Pengolahan	8,12	10,00	10,50	4,41	-2,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-12,03	4,54	-3,08	2,05	13,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,96	1,85	3,93	8,86	-4,67
F	Konstruksi	4,50	8,63	8,13	0,74	2,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,50	0,44	7,54	5,61	0,82
H	Transportasi dan Pergudangan	5,77	12,77	14,18	1,88	-2,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,31	8,40	4,73	1,62	3,95
J	Informasi dan Komunikasi	1,10	1,06	-0,36	2,75	0,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,51	12,90	13,90	9,53	6,53
L	Real Estate	9,66	15,26	9,79	4,70	-1,28
M,N	Jasa Perusahaan	9,20	5,75	8,10	3,26	0,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,09	8,87	9,0	3,22	3,71
P	Jasa Pendidikan	1,56	6,33	4,08	3,60	0,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,20	8,81	8,20	4,97	-3,94
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,87	10,26	7,67	3,90	1,43
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2,67	5,63	-5,10	-2,29	3,01

Keterangan

*) : Angka sementara

**) : Angka Sangat Sementara

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUWU TIMUR**